JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 8 No. 2, 2025, hal 368- 376 ISSN 2746-3249

Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Mahmudin*, Saipudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*mahmudinn19@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze the Original Local Government Revenue in South Kalimantan during the 2016-2021. The data used in this study is quantitative data. The research method used was data panel regression analysis in South Kalimantan Province. The results of this research analysis show that all independent variables simultaneously and partially have a positive and significant effect on the Original Local Government Revenue variable. and this study also shows the largest contribution of each region in increasing Original Local Government Revenue based on independent variables in this study.
Keywords*: Local Tax; Regional Retribution; The Results of The Segregated Regional Assets Management; Other Legitimate Local Native Revenue; Original Local Government Revenue.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah di Kalimantan Selatan 2016-2021. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Adapun metode penelitian yang dipilih adalah regresi data panel di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan semua variabel independen secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. dan penelitian ini juga menunjukkan kontribusi terbesar setiap daerah dalam menambah Pendapatan Asli Daerah berdasarkan variabel independen yang ada di penelitian ini.
Kata Kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi berarti adanya pergerakan ke arah yang lebih baik yang akan membuat kegiatan ekonomi semakin berkembang guna memakmurkan masyarakat (Sukirno, 2011) dan pada akhirnya dengan pertumbuhan ekonomi pastinya akan menggerakkan pendapatan nasional dan juga lokal ke arah yang jauh lebih baik (Iskandar dalam Wau dkk.,, 2022). Di zaman yang terus berkembang ini kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pemerintah daerah sudah secara khusus di atur dalam Undang-Undang dan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun UU terbaru yang mengatur pemerintahan dalam hal perimbangan keuangan yaitu UU No. 1 Tahun 2022.

Daerah diinginkan untuk bisa mandiri dalam mengelola daerahnya sehingga mengharuskan untuk memperhatikan aspek-aspek dasar untuk dapat mewujudkan hal tersebut adapun hal dasar itu berupa pengoptimalan faktor keuangan daerahnya (Hendawati dkk.,, 2018), hal ini dapat diartikan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka untuk kepentingan daerah tanpa terus mengharapkan sumbangan dari pemerintah pusat. Sehingga daerah harus mencari sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Adapun penerimaan-penerimaan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan dari pemerintah pusat, lain-lain pendapatan yang sah (Kaho, 2010).

Pemerintah daerah diharuskan mempunyai kapabilitas untuk mendanai daerahnya oleh karena itu dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan indikator utama yang dilihat yaitu

perolehan dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu wilayah (Monica & Sa'roni, 2022). Apabila dijabarkan secara lebih luas maka Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi tolak ukur terpenting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah (Irfan, 2022). Perlunya Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut untuk pemenuhan target yang dilakukan didaerah tersebut (Iqbal & Sunardika, 2018).

Adanya peningkatan yang dialami Pendapatan Asli Daerah maka berpengaruh untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah karena PAD berguna untuk mendanai keperluan dan kegiatan-kegiatan daerah yang akan berpengaruh untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah (Anggrayani & Imansyah, 2020). Adapun yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan asli yang bersumber dari daerah tersebut baik itu berupa pajak yang diambil sesuai dengan pengaturan daerah yang berlaku di daerah tersebut (Rahardjo, 2014), kemudian juga ada retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis pendapatan asli daerah di Kalimantan Selatan.

Penjelasan di atas membuat penulis akhirnya mendapatkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian kali ini, yaitu: (1) pengaruh retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) pengaruh retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan; (3) kontribusi terbaik apa untuk menambah PAD yang diperoleh dari variabel independen pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

PENELITIAN TERDAHULU

Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Pertama, Ariska Arta Destriyanti (2021) yang meneliti Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa tidak terdapat kontribusi dari jumlah penduduk, inflasi, dan retribusi daerah untuk mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Bantul tersebut. Sedangkan pajak memiliki kontribusi untuk mempengaruhi pendapatan asli di kabupaten Bantul tersebut.

Kedua, penelitian dari Hani Sri Mulyani & Siska A R. (2021) yang meneliti Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh sedangkan secara parsial untuk pajak daerah memiliki sebuah pengaruh yang signifikan dan juga positif, retribusi daerah memiliki sebuah pengaruh yang signifikan dan juga negatif, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki sebuah pengaruh yang signifikan dan juga positif terhadap PAD di Kabupaten Majalengka.

Ketiga, penelitian dari Romandhon & Yusuf Hafandi (2020) yang meneliti Pengaruh Pajak, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil analisis penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dari pajak dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi untuk variabel dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Wonosobo.

Keempat penelitian dari Ari Pranaditya, Wahyu Apriani, & Agus Suprijanto (2017) yang menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Anggaran 2012-2016. Penelitian kali ini menjelaskan bahwa semua hasil dari variabel independen dalam penelitian memiliki sebuah pengaruh untuk pendapatan asli daerah di Kota Salatiga selama periode yang diteliti.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi pembeda dari penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari ruang lingkup penelitian terdahulu yang berasal dari satu daerah saja sedangkan dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berasal dari 13 daerah yang diteliti dan juga dalam penelitian ini menjelaskan variabel independen mana yang paling sesuai dengan potensi setiap daerah guna memanfaatkan variabel independen mana yang dapat dikembangkan untuk setiap daerah.

METODE

Penelitian ini menganalisis Pendapatan Asli Daerah setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan dengan jumlah 13 Kabupaten/Kota selama tahun 2016-2021.

Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Penelitian saat ini menggunakan data berasal dari *website* DJPK dan *website* resmi pemerintah lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Sumber pengumpulan data dan informasi berasal dari data dan artikel yang diterbitkan oleh *website* resmi DJPK Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Selain itu digunakan juga referensi yang berbentuk skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan judul yang dibahas.

Teknik analisis data melalui aplikasi *Eviews 12* dengan menggunakan Model Regresi Data Panel. Rancangan model yang dibangun adalah:

$$\mathbf{InYit = \beta_0 + \beta_1 InX_1it + \beta_2 InX_2it + \beta_3 InX_3it + \beta_4 InX_4it + \mu it}$$

dengan:

Y : pendapatan asli daerah (satuan rupiah)
X_1 : pajak daerah (satuan rupiah)
X_2 : retribusi daerah (satuan rupiah)
X_3 : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (satuan rupiah)
X_4 : lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (satuan rupiah)
t : 1,2,3,4,5,6 (data *time series* 2016-2021)
i : 1,2,3....13 (data *cross section* Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan)
β_1- β_4 : koefisien regresi variabel bebas
β_0 : Intersep

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pemilihan model regresi pada penelitian ini setelah melakukan pengujian untuk model regresi yang terpilih berupa *Common Effect Model (CEM).* Dengan demikian maka uji asumsi klasik yang bisa dilakukan berupa multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2014). Uji pertama yang dilakukan dalam uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas, yang ditunjukkan pada tabel 1 semua hasil tersebut menunjukkan nilai kurang dari 0,80 (< 0,80), maka dapat di artikan dalam penelitian ini tidak ada mengalami masalah multikolonieritas antar variabel independent dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1	0,700910	0,509900	-0,026096
X2	0,700910	1	0,602263	-0,061508
X3	0,509900	0,602263	1	-0,243203
X4	-0,026096	-0,061508	-0,243203	1

Sumber: Hasil Olah Data di *Eviews* 12

Uji yang kedua yang dilakukan dalam uji asumsi klasik adalah Heterokedastisitas

Tabel 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12,13804	5,486733	2,212252	0,0301
X1	0,029306	0,042265	0,693384	0,4903
X2	-0,270783	0,254795	-1,062748	0,2914
X3	0,038564	0,415814	0,092743	0,9264
X4	-0,084289	0,044195	-1,907221	0,0604

Sumber: Hasil Olah Data di *Eviews* 12

Berdasarkan tabel 2 dapat di artikan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedatisitas karena nilai *probability* dari setiap variable independent lebih besar dari 0,05.

Uji Signifikansi

Dalam Uji Signifikansi menggunakan model yang terpilih berdasarkan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Sehingga model yang terpilih dan akan digunakan dalam Uji Signifikansi adalah *Common Effect Model (CEM)*.

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8,487685	5,943111	1,428155	0,1575
X1	1,031818	0,045780	22,53844	0,0000
X2	0,753156	0,275989	2,728936	0,0080
X3	1,016153	0,450401	2,256105	0,0271
X4	0,926918	0,047871	19,36283	0,0000
R-squared	0,958486	Mean dependent var		160,3988
Adjusted R-squared	0,956211	S.D dependent var		67,74738
S.E. of regression	14,17664	Akaike info criterion		8,203023
Sum squared resid	14671,32	Schwarz criterion		8,354095
Log likelihood	-314,9179	Hannan-Quinn criter.		8,263500
F-statistic	421,3617	Durbin-Watson stat		2,499840
Prob (F-statistic)	0,000000			

Sumber: Hasil Olah Data di *Eviews* 12

Uji Simultan

Penggunaan uji simultan berguna menyelidiki apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau menyeluruh memiliki pengaruh kepada variabel dependen yang sedang diteliti (Widarjono, 2013). Berdasarkan hasil olah data di tabel 3 nilai Prob (F-statistik) 0,000000. Sehingga bermakna nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi (< 0,05). Sehingga, kesimpulannya secara variabel independen bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial

Adanya pengujian secara parsial berguna untuk meliat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen dengan anggapan variabel independen lainnya tidak berubah atau konstan (Gujarati, 2012). Berdasarkan hasil pengolahan data di tabel 3 diatas diketahui besar nilai untuk t-tabel 1,99300 hal ini berasal dari jumlah variabel sebanyak 5 (k = 5) dan jumlah observasi sebanyak 78 data (n = 78), df = n – k = 73. Dengan perhitungan titik

persentase distribusi t dengan signifikansi sebesar 5% maka diperoleh hasil nilai t-tabel sebesar 1,99300.

Pertama, untuk variabel (X1) yaitu pajak daerah mempunyai nilai t-hitung > t-tabel (22.53844 > 1,99300), kemudian mempunyai nilai *probability* < signifikansi (0,0000 < 0,05). Jadi, dapat dikatakan untuk variabel independen ini secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel dependennya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dari penelitian Siska Ayu Ramdini & Hani Sri Mulyani pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan juga signifikan jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, dengan kata lain apabila terjadi peningkatan maupun penurunan dari pajak daerah akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi publik yang dikembangkan oleh Musgrave, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah hal tersebut guna meningkatkan penerimaan suatu daerah yang pada akhirnya juga akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, kemudian dengan pertumbuhan ekonomi yang ada pastinya diharapkan terjadinya meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut menyebabkan pajak daerah dapat menjadi faktor yang berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Saputro & Saleh, 2022).

Sehingga dapat disimpulkan juga dengan semakin bertambahnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak maka akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah yang juga dapat digunakan untuk perkembangan kepentingan umum yang dapat dirasakan semua orang guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di masyarakat dan dapat sebagai ajang pemerintah untuk mendapatkan apresiasi lebih dari masyarakatnya sekitar.

Kedua, untuk variabel (X2) yaitu retribusi daerah mempunyai nilai t-hitung > t-tabel (2.728936 > 1,99300), kemudian mempunyai nilai *probability* < signifikansi (0,0116 < 0,05). Jadi, dapat dikatakan untuk variabel independen ini secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel dependennya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dari penelitian Wahyu Apriani, Agus Suprijanto dan Ari Pranaditya pada tahun 2017 yang menunjukkan retribusi daerah memiliki pengaruh jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Tetapi berbeda halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariska Arta Destriyanti pada tahun 2021, Yusuf Hafandi dan Romandhon pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah.

Dalam Retribusi daerah, teori ekonomi publik yang dikembangkan oleh Musgrave, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan untuk daerah yang diperoleh dari hasil penerimaan retribusi daerah, hal tersebut berguna untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut yang berdampak juga kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan bahwa saat peran pendapatan asli daerah kian meningkat dalam struktur fiskal daerah tersebut sebagai pemasukan keuangan daerah maka kian naik pula kredibilitas keuangan daerah guna menjalankan aktivitas pembangunan daerah (Carunia, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga dapat sebagai salah satu hal yang dapat meningkatkan kas daerah yang berguna untuk perkembangan daerah tersebut. Sehingga dengan adanya peningkatan penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah maka akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan asli daerah.

Ketiga, untuk variabel (X3) yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai nilai t-hitung > t-tabel (2.256105 > 1,99300), kemudian mempunyai nilai *probability* < signifikansi (0,0271 < 0,05). Jadi, dapat dikatakan untuk variabel independent ini secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel dependentnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wahyu Apriani, Agus Suprijanto dan Ari Pranaditya pada tahun 2017 yang menjelaskan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Tetapi berbeda dengan penelitian dari Romandhon & Yusuf Hafandi 2020 menjelaskan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Sehingga hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh positif dan signifikan jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah dengan kata lain apabila terjadi peningkatan maupun penurunan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini dilihat dari adanya hasil keuntungan sebuah perusahaan suatu daerah yang menjadi penambah pendapatan daerah dimana modalnya baik secara menyeluruh maupun sebagian dapat dimanfaatkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Yani, 2008).

Jika dikaitkan dengan teori ekonomi publik yang dikembangkan oleh Musgrave, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah yang diperoleh laba usaha milik daerah, hal tersebut guna meningkatkan penerimaan suatu daerah yang berdampak juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi, dengan adanya keuntungan yang ada pada perusahaan suatu daerah yang menjadi penambah pendapatan daerah yang modalnya baik secara menyeluruh maupun sebagian dimanfaatkan menjadi kekayaan daerah akan menambahkan kas daerah atau secara tidak langsung membantu meningkatkan Pendapatan asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah tersebut juga.

Keempat, untuk variabel (X4) yaitu pendapatan asli daerah lainnya yang sah mempunyai nilai t-hitung > t-tabel (19.36283 > 1,99300), kemudian mempunyai nilai *probability* < signifikansi (0,0000 < 0,05). Jadi, dapat dikatakan untuk variabel independen ini secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel dependennya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dari Romandhon & Yusuf Hafandi 2020 yang menunjukkan bahwa variabel independen ini memiliki pengaruh jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh jika dikaitkan dengan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh positif dan signifikan jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah dengan kata lain apabila terjadi peningkatan maupun penurunan dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah akan mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jenis pendapatan asli daerah lainnya yang sah dimana semua itu dapat menambah kas atau kekayaan daerah. Jika dikaitkan dengan teori ekonomi publik yang dikembangkan oleh Musgrave, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah hal tersebut guna meningkatkan penerimaan suatu daerah yang berdampak juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.. Jadi, dapat ditarik kesimpulan pendapatan asli daerah lainnya yang sah merupakan hal yang akan menambah kas atau kekayaan daerah.

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Pada tabel 3 nilai untuk *Adjusted R-squared* 0,956211 yang bermakna kemampuan dari semua variabel independen pada penelitian saat ini dapat menjelaskan variabel dependen adalah 95,62% sedangkan 4,38% di sebabkan dari faktor atau variabel yang tidak ada diteliti dalam penelitian saat ini.

Potensi penambah nilai PAD setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Penerimaan daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah pasti sangat membantu untuk perkembangan daerah tersebut, tetapi dalam suatu daerah pastinya tidak semua variabel penerimaan asli daerah dapat dioptimalkan hal itu dikarenakan adanya potensi dari daerah masing-masing yang berbeda (Eksandy dkk.,, 2019).

Potensi penambah nilai PAD untuk Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan harus bisa mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari sumber penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan kemudian diharapkan juga akan terus mengembangkan untuk penerimaan-penerimaan dari variabel yang lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru harus bisa mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari sumber penerimaan daerah berupa pajak dan juga pendapatan asli daerah lainnya yang sah kemudian juga diharapkan terus mengembangkan untuk penerimaan-penerimaan dari variabel yang lainnya.

Potensi daerah sangat berdampak terhadap pengoptimalan variabel yang sesuai dengan daerah tersebut dapat dilihat saja dari 3 Kabupaten yang berdekatan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara yang memiliki persamaan dalam pengoptimalan penerimaan daerahnya yang besar berasal dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berarti kabupaten tersebut bisa pengoptimalan dari sumber lain-lain milik Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya sesuai potensi daerah yang dimiliki (Halim, 2007).

Di beberapa daerah juga ada yang mengandalkan potensi dari variabel pajak daerah dan variabel pendapatan asli daerah lainnya yang sah sehingga menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak hanya berfokus terhadap satu pengembangan variabel saja. Adapun contoh daerahnya adalah Kabupaten Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.

Diharapkan semua Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan harus bisa mengoptimalkan dan juga mengembangkan penerimaan daerah mereka sesuai dengan potensi yang ada di daerah mereka pula. Sehingga pada akhirnya dengan pengoptimalan dari variabel-variabel penerimaan daerah tersebut akan berdampak terhadap peningkatan nilai PAD di daerah masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial yang positif dan juga signifikan terhadap variabel dependen.

Kedua, kemampuan dari semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 95,62% sedangkan sisanya 4,38% berasal dari variabel atau factor lain diluar penelitian ini. Sehingga dapat diartikan variabel independen yang ada dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependennya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimangtan Selatan.

Ketiga, Pendapatan Asli Daerah pasti sangat membantu untuk perkembangan daerah, tetapi dalam suatu daerah pastinya tidak semua variabel penerimaan asli daerah dapat dioptimalkan hal itu dikarenakan adanya potensi dari daerah masing-masing yang berbeda. Potensi daerah sangat berdampak terhadap pengoptimalan variabel yang sesuai dengan daerah

tersebut dapat dilihat saja dari 3 Kabupaten yang saling berdekatan seperti Hulu Sungai Utara, Selatan dan Tengah, yang memiliki persamaan dalam pengoptimalan penerimaan daerahnya yang berasal dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Di beberapa daerah juga ada yang mengandalkan potensi dari variabel pajak dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sehingga hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak hanya berfokus terhadap satu pengembangan variabel saja. Adapun contoh daerahnya adalah Kabupaten Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.

Implikasi Penelitian

Pemerintah harus lebih cermat dalam mengoptimalkan variabel penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing sehingga dengan adanya pengembangan terhadap variabel penerimaan daerah tersebut diharapkan berdampak baik bagi peningkatan nilai variabel tersebut sehingga akan meningkatkan nilai PAD daerah tersebut juga.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menganalisis salah satu sumber penerimaan untuk suatu daerah, yaitu pendapatan asli daerah saja dan rentan waktu dalam penelitian ini juga relative singkat hanya 6 tahun saja.

Saran

Pertama, untuk pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan variabel untuk penerimaan daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaaan untuk di sector yang berkaitan dengan variabel yang memiliki potensi di daerah masing-masing.

Kedua, untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis sumber penerimaan daerah lainnya dan penelitiannya juga bisa lebih diperpanjang sehingga dapat terlihat pengaruhnya dalam jangka yang lebih panjang.

BIBLIOGRAPHY

Anggrayani, R., & Imansyah, M. H. (2020). Mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Relatif Rendah? *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *21*(1), 1–9.

Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2. *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 1–15.

Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Elektronik data prosesing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Denisa media.

Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Destriyanti, A. A. (2021). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020*.

Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(2), 85. https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917

Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.

Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 182–191.

https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.

Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2018). the Effect of Capital Cost and General Allocation Fund To the Regional Financial Independence in Bandung City Government. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, *1*(2), 155–163. https://doi.org/10.17509/tjr.v1i2.12934

Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daeah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. *9*(April), 10–35.

Irfan, M. A. (2022). *Optimalisasi pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap peningkatan pad kabupaten sarolangun provinsi jambi*. 1–11.

Kaho, J. R. (2010). *Prospek otonomi daerah di negara republik indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah)*. PT Raja Grafindo Persada.

Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(2), 819. https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7031

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1991). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, alih bahasa oleh Alfonsus Sirait*. Erlangga.

Pemerintah Indonesia RI. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, *104172*, 1–143. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499

Rahardjo, A. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.

Saputro, S. E., & Saleh, M. (2022). Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019) Setyo. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(2), 1–23.

Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, *2*(2), 151–172. https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613

Sukirno, S. (2011). *Makro ekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja grafindo Persada.

Wau, M., Wati, L., & Fau, J. F. (2022). Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik). In *Eureka Media Aksara, Januari 2022 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021*.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonesia.

Yani, A. (2008). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah di Indonesia. Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.